

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Kekayaan alamnya melimpah ruah dari sabang sampai merauke dan dikaruniai banyaknya sumber daya alam yang beragam. Indonesia juga terkenal menjadi salah satu bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam segi kehidupan kerukunan umat beragama. Kerukunan beragama adalah suatu hubungan antar manusia berdasarkan keyakinan agama yang dianut dimana semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan seperti saling menjaga, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai segala perbedaan. Dalam menciptakan kerukunan serta kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah dan tokoh agama sangat berperan penting untuk menjaga kerukunan. Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat secara aman, damai, sejahtera, dan jauh dari perpecahan atau kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas kerukunan di Indonesia. Salah satu syarat terbentuknya demokrasi yang damai adalah penghormatan dan pengakuan terhadap keragaman (pluralitas) masyarakat dan bangsa. Namun, benar bahwa konsep multikulturalisme dan pluralisme begitu sulit untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga tidak jarang pemahaman konsep multikulturalisme dan pluralisme

menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat.¹ Segala bentuk keragaman yang ada di Indonesia sejak dulu telah terbangun dan sudah di rencanakan oleh para pendahulu bangsa, bahkan sebelum bangsa Indonesia merdeka kita sudah di satukan dalam sebuah semboyan yang menyatukan semua suku, budaya, bahasa dan agama, dengan semboyannya “Bhineka Tunggal Ika”.² Dalam hal ini berarti bahwa segala perbedaan yang ada di Indonesia disatukan dalam satu ikatan dalam tujuan yang sama. Semboyan Bhineka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fungsi dasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya setiap kelompok memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, peran semboyan Nasional inilah untuk membentuk dan menanamkan keragaman dalam suatu masyarakat agar tidak memicu sebuah konflik. Meskipun telah dijelaskan dalam UUD atau dalam Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Pasal 29(2) Bab XI UUD 1945 “Negara menjamin setiap warga negara untuk merdeka menjalankan agamanya dan bertingkah laku sesuai dengan agama masing-masing. dan kepercayaanya”³

Di akui atau tidak bahwa perbedaan bisa menjadi sumber masalah jika tidak segera diantisipasi sejak dini, karena perbedaan akan membuat problem-problem baru di masyarakat, terbukti dari perbedaan itu muncul di sekitar lingkungan kita. Tentu

¹ Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi (Jakarta: Cv. Rajawali, 1988), halm. 10

² Tabi'in, A. "Pengenalan Keanekaragaman Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi pada Anak Usia Dini." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 9.2 (2020): 137-151.

³ UUD 1945 Amandemen ke IV (Penerbit Pustaka Sandro jaya Jakarta.hal 21

tidak mudah bagi masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap keberagaman, dimana salah satu yang menjadi masalah setiap tahun bagi bangsa Indonesia adalah masalah kasus tentang intoleransi atau kerukunan yang dapat memicu sebuah konflik perpecahan.

Akhir-akhir ini banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan suku, agama, dan ras, yang jika di biarkan terus menerus dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Banyaknya kasus meningkat di Indonesia di mulai sejak tahun 2012 hingga 2020 selama masa pandemi, dan terakhir bisa kita saksikan pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta pada 2017 lalu. Dalam kontestasi politik di selenggarakan di DKI Jakarta, kemarin begitu memperhatikan karena banyaknya muncul isu sara yang diwarnai dengan meningkatnya aksi intoleransi, provokasi, dan ujaran kebencian terhadap beberapa kelompok melalui identitas keagamaan untuk kepentingan politik. Identitas dapat berubah menjadi politik identitas apabila basis perjuangannya adalah basis perjuangan kelompok.⁴ Tentunya hal ini sangat di sayangkan karena Indonesia sangat kaya akan keberagaman, sumpah pemuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika di ciderai oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran penuh akan pentingnya menjaga kesatuan bangsa. Kasus konflik di Indonesia yang menyangkut soal agama sudah sering terjadi. Di Maluku dan Lampung menjadi salah satu bukti bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat utuh melainkan terkait dan terpengaruh oleh dinamika sosial yang terus berkembang

⁴ Zainan Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keagamaan Indonesia, CRCS, 2011, hlm 18.

mengikuti zaman. Kasus Intoleransi atau kasus kekerasan atas nama agama memang menjadi problem bagi kita semua untuk terus mengintropeksi diri. Agama yang seharusnya menjadi kabar gembira dan pedoman hidup bagi umat manusia untuk berbuat baik ke semua makhluk hidup, kini justru diciderai oleh sebagian penganutnya yang merasa paling benar sendiri, mereka membenci dan berbuat kerusakan atas nama agama. Dalam ajaran semua agama yang resmi di akui di Indonesia baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, tidak pernah mengajarkan sedikit pun bagi pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang tercela atau merugikan orang lain. Perilaku buruk apa pun yang mengatasnamakan perintah agama, sebenarnya karena mereka kurang memahami ajaran agama dengan benar. Rentannya konflik antar dan intra pemeluk agama di Indonesia lebih disebabkan karena cara beragama yang cenderung eksklusif. Eksklusivitas merupakan pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan yang menganggap bahwa ajarannya yang paling benar dan mengisolasi agamanya dari pihak lain yang pada akhirnya dapat menyebabkan lahirnya sikap dan tindak laku tertutup dan menutup diri.⁵

Menurut Moch Nurhasim Munculnya kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antar lain :

⁵ Thariq Modangu, dkk., Model Rembug dalam Membangun Toleransi Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 323.

1. Pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
2. Fanatisme agama. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda.
3. Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik ini dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan diskomunikasi (komunikasi yang buruk).⁶

Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota, hegemoni kota Jakarta yang sangat kuat dapat mempengaruhi ketergantungan hubungan ekonomi dan sosial budaya di kota Depok. Depok adalah contoh tipologi kota penyangga metropolitan Indonesia, selain di ibu Kota yang menjadi tempat tujuan para pendatang, kota Depok juga menjadi tujuan kedua bagi para pendatang, kawasan yang dulunya merupakan tanah partikelir pribadi milik seorang warga negara Belanda bernama Cornelis Chastelein.⁷ Kini berkembang pesat menjadi rumah bagi kaum urban, pusat industri, kawasan perdagangan, dan pusat pendidikan. Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi orang-orang yang berada di plosok negeri untuk berdatangan baik untuk bekerja maupun untuk melanjutkan pendidikannya. Kota Depok yang beragam dengan ciri masyarakat

⁶ 4 Moch Nurhasim, "Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal", (Litbang Pelita: Bandung, 2001), hal.102.

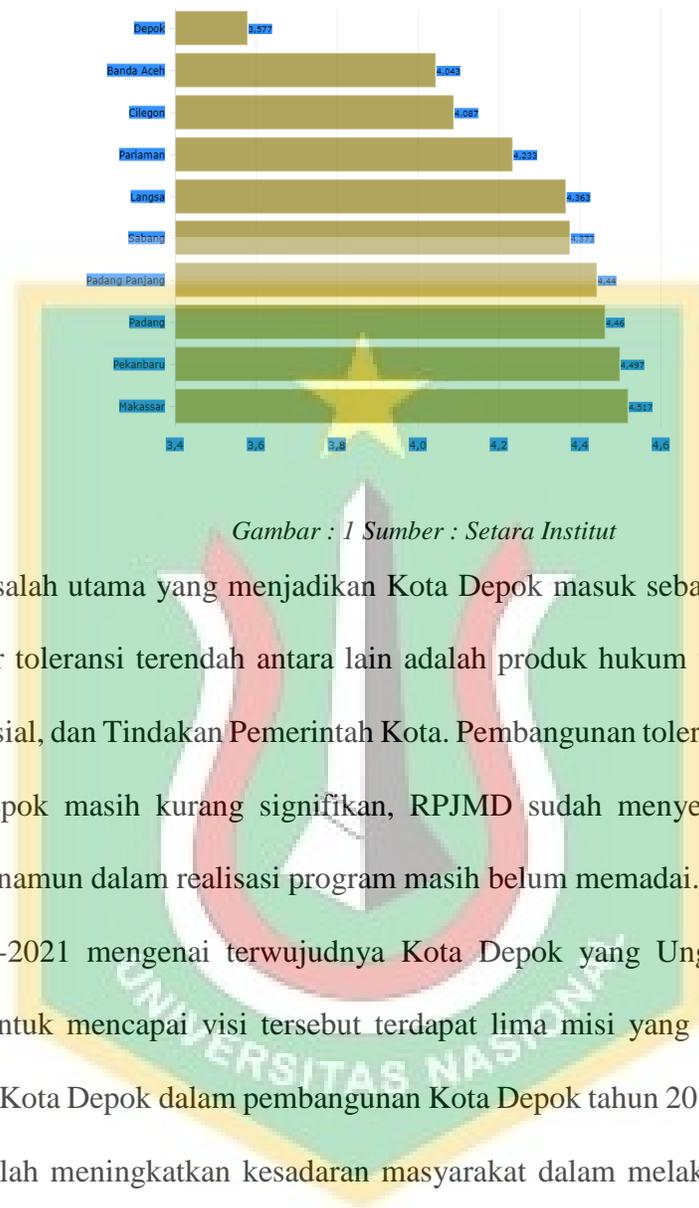
⁷ Suryana, Asep. "Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 6.2 (2004): 29-48.

yang heterogen dengan warna-warni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, suku serta budayanya hidup berdampingan dan berbaur dalam aktivitas sosial. Dari berbagai jenis keragaman yang ada di kota Depok, pastinya tidak luput dengan perbedaan pendapat antar umat beragama, karena perbedaan dianggap sebagai suatu dinamika kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan bersama. Perbedaan pandangan dalam beragama menjadi suatu alasan untuk melakukan perdebatan atau perselisihan dan sebagainya. Di sinilah penting sekali peran para pemuka agama untuk menciptakan keharmonisan dan menjunjung nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sebenarnya menciptakan kerukunan atau keharmonisan dalam beragama memang tugas bagi semua lapisan masyarakat, baik dari kita sendiri, para tokoh agama, maupun dari pemerintah, semuanya saling ikut andil. Di samping menciptakan keharmonisan juga mampu menciptakan kesetaraan, keamanan, dan keadilan, terutama untuk kaum minoritas. Rasanya sulit bagi kita untuk berempati dan menghormati warga minoritas, jika seumur hidup kita tinggal di tengah warga mayoritas.⁸

Demi terciptanya keharmonisan umat beragama, kesadaran dirilah yang paling utama untuk menciptakan kerukunan, sama-sama saling merasakan, mengerti, menjaga, dan memahami satu sama lain untuk hidup rukun berdampingan adalah sebuah keniscayaan bersama bagi mereka yang mendambakan sebuah kedamaian. Upaya menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kota Depok

⁸ Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 125-142.

yang heterogen sangatlah penting, mengingat beragam jenis suku, ras, dan agama berkumpul dalam sebuah aktivitas sosial setiap hari sangat memungkinkan terjadinya suatu konflik. Untuk itu guna menjaga kerukunan umat beragama diperlukan konsolidasi atau sinergi dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemuka, dan Pemerintah. Dalam hal ini yang menyangkut soal kerukunan umat beragama, para pemuka memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat dan dianggap yang lebih kompeten dalam urusan masalah keagamaan dan moral guna membimbing para pengikutnya. Juga pemuka agama diharapkan mampu membangun hubungan dengan para pemuka agama lain dan dapat mencegah suatu konflik nantinya. Penulis melakukan penelitian terkait masalah ini, karena banyaknya persoalan yang terjadi akhir-akhir ini dan tidak sedikit menyangkut isu persoalan agama, agama seharusnya menjadi tuntunan atau pedoman hidup bagi manusia untuk menebar kebaikan ke-semua makhluk hidup justru dijadikan alat propaganda politik ataupun yang lainnya untuk kepentingan ambisi manusia untuk menebarkan kebencian dan perpecahan atas nama agama. Persepsi tentang kerukunan beragama akhir-akhir ini menarik perhatian penulis. Mengingat Kota Depok menempati urutan ke 90 dengan skro 3.347 skor terendah dalam hal toleransi atau menyangkut tentang kerukunan umat beragama, berikut tabel menurut SETARA Institut yang menjadikan Kota Depok memperoleh skor terendah.



Gambar : 1 Sumber : Setara Institut

Masalah utama yang menjadikan Kota Depok masuk sebagai peringkat Kota dengan skor toleransi terendah antara lain adalah produk hukum yang diskriminatif, Regulasi sosial, dan Tindakan Pemerintah Kota. Pembangunan toleransi dan kerukunan di Kota Depok masih kurang signifikan, RPJMD sudah menyebut visi mengenai kerukunan, namun dalam realisasi program masih belum memadai. Pada visi RJMMD tahun 2016-2021 mengenai terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius. Untuk mencapai visi tersebut terdapat lima misi yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Depok dalam pembangunan Kota Depok tahun 2016-2021 yang salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.⁹ Dengan berbagai persoalan kerukunan beragama penulis perlu mengkaji lebih dalam terkait “Persepsi Tentang Kerukunan Beragama Kalangan

⁹ <https://setara-institute.org/ringkasan-eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/> di akses pada 18 Juni 2022 pukul 11.11

Pemuka Agama di Depok” Dengan harap sekali penulis dapat memberikan manfaat dan solusi bagaimana masyarakat maupun negara dapat menerapkan dan memahami konsep kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah topik penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Tentang Kerukunan Beragama Kalangan Pemuka Agama di Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana Persepsi Tentang Kerukunan Beragama Kalangan Pemuka Agama di Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang kajian sosiologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

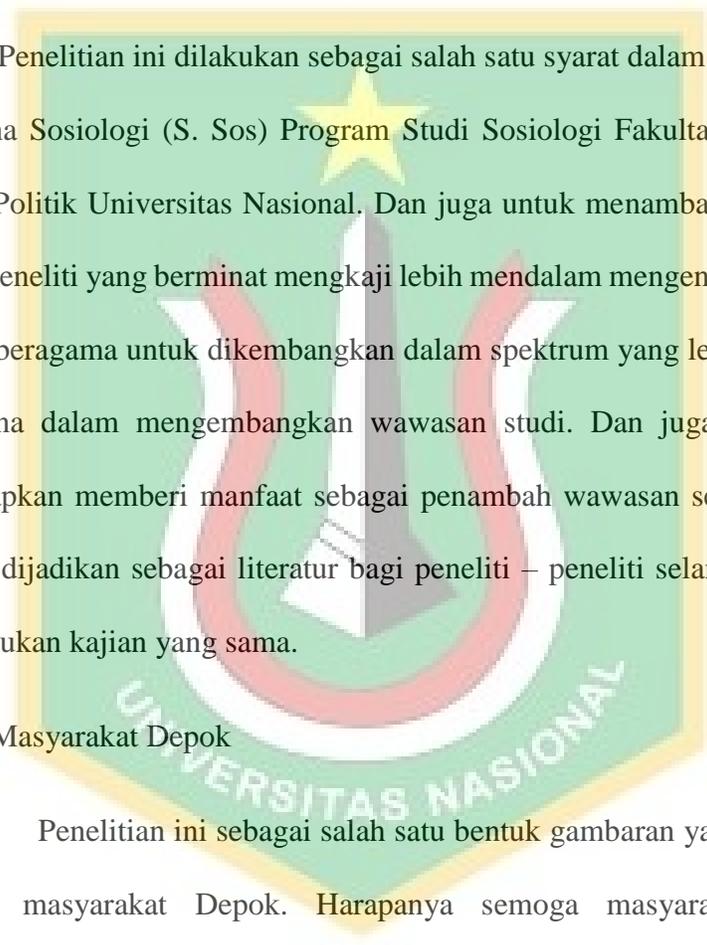
a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kerukunan antar umat beragama serta memberikan kontribusi pada bidang kajian

ilmu sosiologi dalam memperkaya wawasan di kalangan akademisi, khususnya relasi dalam bidang sosiologi.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti



Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S. Sos) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Dan juga untuk menambah bahan informasi bagi peneliti yang berminat mengkaji lebih mendalam mengenai kerukunan antar umat beragama untuk dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas dan dapat berguna dalam mengembangkan wawasan studi. Dan juga bagi mahasiswa diharapkan memberi manfaat sebagai penambah wawasan secara umum, serta dapat dijadikan sebagai literatur bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama.

2) Bagi Masyarakat Depok

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk gambaran yang akan diberikan untuk masyarakat Depok. Harapannya semoga masyarakat Depok bisa mengetahui bahwasanya kondisi riil di daerah depok sangat beragam dan masyarakat bisa selalu berkerjasama antar umat agama lain. Kita bisa memahami bahwasananya keberagaman tentunya dapat menimbulkan suatu permasalahan dan saya harap semoga di kota Depok masyarakat senantiasa selalu menjaga kerukunan dan menjunjung nilai toleransi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan menggunakan pedoman teknis penulisan skripsi Universitas Nasional yang terdiri dari lima bab yang disertai oleh beberapa sub bab. Berikut penjelasan dari sistematika penulisan skripsi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab II ini menjelaskan mengenai penelitian tyerdahulu yang relevan, studi Pustaka, konsep-konsep dan kerangka berfikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk melaksanakan penelitian yang mencakup jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta temuan yang ada dilapangan, serta hasil analisis dengan menggunakan teori yang dipilih oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis.